



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan penetapan kinerja / rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 terdapat 4 (empat) sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Surabaya, maka dilaksanakan 1 (satu) program prioritas pembangunan yaitu Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan utama, yakni Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat, dengan *output* kegiatan Waktu Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat selama 12 bulan dan sudah terlaksana 12 bulan (100%).

Adapun jumlah keluhan yang diterima melalui Media Center pada Tahun 2014 adalah sebanyak 4.298 keluhan, meningkat 2,9% lebih bila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 4.176 dengan persentase tindaklanjut keluhan sebesar 100% yang berarti semua keluhan (4.298 keluhan) yang masuk ke Media Center telah berhasil ditindaklanjuti sesuai dengan yang ditargetkan

Dalam pencapaian target indikator Kinerja ini, tidak terdapat hambatan. Keberhasilan capaian tindak lanjut pelayanan keluhan masyarakat tidak lepas dari dukungan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat (TPKPM) Kota Surabaya yang terbentuk melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/54/436.1.2/2013 tentang Tim Pelayanan Keluhan / Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya. Untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan para anggota TPKPM dalam menangani keluhan, Dinas Komunikasi dan Informatika secara rutin mengadakan pertemuan bersama TPKPM.

2. Sasaran 2 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kegiatan dan pembangunan kota Surabaya maka dilaksanakan 1



(satu) program prioritas pembangunan yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah pengunjung yang mengakses situs resmi milik pemerintah kota Surabaya yaitu www.surabaya.go.id yang berisikan informasi-informasi tentang kota Surabaya. Pada tahun 2014, rata-rata jumlah kunjungan pada setiap bulannya adalah sebanyak 244.652 kunjungan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 52.689 kunjungan, maka capaian kinerjanya adalah 464,33 %.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa pada tahun 2014 melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilaksanakan sebanyak 20 kali. Selama tahun 2014, target kegiatan hanya direalisasikan sebanyak 19 kali kegiatan, sehingga prosentasi pencapaian Rencana Kerja 2014 hanya tercapai 95%. Realisasi kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim karena mengikuti Jadwal Pemerintah Provinsi Jatim, yakni dilaksanakan pada 2015. Adapun kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang telah dilaksanakan adalah: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (1 kali), Bakorwil Kelompok Informasi Masyarakat (1 kali), Korinko (Koordinasi Informasi dan Komunikasi) (7 kali), Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (10 kali).

2) Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan sebanyak 107 kali. Selama tahun 2014, target kegiatan telah direalisasikan sebanyak 114 kali, melebihi Rencana Kerja. Sehingga prosentasi pencapaian Rencana Kerja 2014, tercapai 106,54%.

3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Jumlah data dan informasi yang diupload di website www.surabaya.go.id ditargetkan sebanyak 1.872 materi. Selama tahun 2014, target kegiatan telah direalisasikan sebanyak 1.923 materi (102,72%). Adapun Kegiatan Pengelolaan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah meliputi: Pengelolaan Media Center (1.923 materi), Produksi Buku Profil Surabaya (300 buku), Produksi Film Profil dan Film



Dokumentasi Pembangunan Kota Surabaya (400 keping), Produksi Informasi Data Pokok Kota Surabaya 2013 (250 buku).

3. Sasaran 3: Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi, maka dilaksanakan 1 (satu) program prioritas pembangunan yaitu Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 2 (dua) indikator peningkatan persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik, dan indikator peningkatan persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna.

3.1 Capaian Indikator Presentase antara Jumlah Layanan Publik berbasis TIK dengan jumlah total Layanan publik (108 Pelayanan Publik)

Jumlah realisasi layanan publik berbasis TIK di Pemerintah kota Surabaya pada tahun 2014 adalah sebanyak 24 sistem layanan publik, jika dibandingkan dengan jumlah total layanan publik (108 sistem layanan publik) maka persentasenya adalah 22,22 %. Apabila dibandingkan dengan target persentase layanan publik yang berbasis TIK pada tahun 2014 yaitu 20 sistem adalah 18,52 % maka capaian kinerjanya adalah 119,98 %.

3.2 Capaian Indikator presentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna.

Jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 3.827 orang, dibandingkan dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK sebanyak 27.725 orang maka persentasenya adalah 13,80 %. Apabila dibandingkan dengan target persentase pengguna layanan publik berbasis web pada tahun 2014 adalah 7% maka capaian kinerjanya adalah 197,19 %. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah pelayanan publik yang didukung TIK dan sasaran Meningkatnya pengguna pelayanan publik berbasis web melalui Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah:

1. Kegiatan Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pada tahun 2014, target pembangunan jaringan fiber optik adalah 5 (lima) SKPD. Dengan dibangunnya jaringan fiber optic pada 5 SKPD, target 2014 telah terealisasi 100%. Kelima SKPD tersebut adalah: 1). SKPD Kecamatan Wonokromo; 2). SKPD Kecamatan Dukuh Pakis; 3). SKPD Kecamatan Sawahan; 4). SKPD Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya; 5). RSUD Dr. Suwandi.



2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Waktu Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi selama 12 bulan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan pada 2014, sehingga realisasi pencapaian kegiatan ini 100%. Adapun Kegiatan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi meliputi: Audit berkala sertifikasi ISO 27001, dengan kegiatan Pelaksanaan Surveillance Audit ke-2 dan Perpanjangan Lisensi Fortigate, Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (12 bulan), Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja (12 bulan), Sewa Alat dan Jaringan Hotspot (12 bulan).

3. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output jumlah sistem informasi pelayanan publik dan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi ke pusat data sejumlah 10 (sepuluh) sistem. Pada 2014 terealisasi 10 sistem atau 100%. Adapun Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data meliputi: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website (5 sistem), Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data (5 sistem), Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Teknomogi Informasi selama 12 bulan

4. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Waktu Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik selama 12 bulan melalui sub kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Data Spasial (12 bulan), Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (12 bulan), Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Integrasi Data Perijinan Online (12 bulan), dan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Integrasi Database (12 bulan). Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan (100%).

5. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi selama 12 bulan dan sudah terlaksana 100% (12 bulan) dengan sub kegiatan Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi (12 bulan) dan Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi kepada 137 orang.



6. Kegiatan Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output jumlah pembangunan grounding gedung Pemerintah Kota Surabaya sejumlah 12 (duabelas) gedung dan sudah terlaksana 100% (12 gedung), yaitu Puskesmas Kenjeran, Puskesmas Asemrowo, Puskesmas Banyu Urip, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Kebonsari, Puskesmas Lidah Kulon, Puskesmas Lontar, Puskesmas Wiyung, Puskesmas Kalirungkut, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Sidotopo Wetan dan Puskesmas Wonokusumo.

7. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi selama 12 (duabelas) bulan, melalui sub kegiatan Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya (12 bulan), Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (12 bulan) dan Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya (12 bulan) dan sudah terlaksana 100%.

Pemeliharaan Grounding Pemerintah Kota Surabaya (65 titik) dilaksanakan guna untuk meminimalisir terjadi sambaran petir dengan mengganti grounding yang hilang, atau mengganti grounding telah aus/tidak sesuai dengan standar. Pemeliharaan Tower (91 titik) dilakukan dengan mengganti seling (klem, kewel, stardcable, dajrum keras) dikarenakan korosi akibat cuaca. Sementara itu Pemeliharaan Alat Komunikasi meliputi Repeater (28 unit), Rig (56 unit), dan HT (577 unit) dilakukan dengan memonitor frekuensi HT agar tidak terjadi tumpang tindih frekuensi antara yang satu dengan lainnya, overleaping, dan kerusakan sarana komunikasi (repeater)

8. Kegiatan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output waktu pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama yang dilakukan 12 Bulan melalui sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.

Pengawasan pemanfaatan menara telekomunikasi telah terlaksana 100% (12 bulan) dengan memonitor tower-tower seluler yang ada di Surabaya untuk mengetahui lokasi tower, dan kondisi tower, survey rekomendasi menara telekomunikasi, pembinaan pemanfaatan menara telekomunikasi dengan target sasaran pengusaha menara telekomunikasi, provider dan pemilik gedung tinggi yang ada di Kota Surabaya.

9. Kegiatan Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan opensource software selama 12 bulan. Kegiatan ini telah terlaksana 100% (12 bulan) melalui sub kegiatan Implementasi Sistem Berbasis Open Source (5 SKPD), Kompetisi Operating System Software Berbasis



Open Source (2 kali), Pelayanan Pengaduan Open Source (Pendampingan SKPD) (12 bulan), Pengembangan Sistem Berbasis Open Source (1 sistem).

10. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 20 kali, dan telah terlaksana 100 % (20 kegiatan) melalui sub kegiatan Pemanfaatan Aplikasi Milik Pemerintah Kota Surabaya.

4. Sasaran 4: Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selain 3 (tiga) sasaran utama yang didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya guna mendukung capaian sasaran, program dan indikator RPJMD Kota Surabaya 2010-2015, juga terdapat sasaran utama yang menjadi penunjang capaian indikator Program RPJMD Kota Surabaya 2010-2015 yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, melalui pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan.

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan dilaksanakan dengan output Jumlah lokasi pendidikan yang memanfaatkan layanan Internet sebanyak 578 titik selama 12 bulan telah terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan bulan desember 2014.

Selain kegiatan tersebut, terdapat pula program / kegiatan penunjang lain yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2014 adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk memberikan sarana dan prasarana perkantoran melalui kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan output Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran selama 12 bulan, kegiatan ini telah terlaksana 100 % (12 bulan), melalui sub kegiatan: Penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Bulan), Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (9 jenis), Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (12 bulan), Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (12 bulan), Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 bulan), Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (12 bulan), Penyediaan Makanan dan Minuman (12 bulan), Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (12 bulan), Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (12 bulan). Salah satu sub kegiatan penyediaan barang dan jasa adalah Penunjang Pengelolaan BLC dan Telecenter.

Jumlah BLC yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 23 BLC dan 1 Telecenter yang tersebar pada 16



Kecamatan di Kota Surabaya, sebagai berikut: 1. Kecamatan Benowo (2 BLC), 2. Kecamatan Bulak (1 BLC), 3. Kecamatan Dukuh Pakis (1 BLC), 4. Kecamatan Genteng (4 BLC), 5. Kecamatan Gunung Anyar (1 BLC), 6. Kecamatan Karang Pilang (2 BLC), 7. Kecamatan Kenjeran (2 BLC), 8. Kecamatan Mulyorejo (2 BLC), 9. Kecamatan Rungkut (1 BLC), 10. Kecamatan Sambikerep (1 BLC), 11. Kecamatan Sawahan (1 BLC), 12. Kecamatan Semampir (1 BLC), 13. Kecamatan Sukomanunggal (1 BLC), 14. Kecamatan Tegalsari (2 BLC), 15. Kecamatan Wiyung (1 BLC), 16. Kecamatan Wonokromo (1 BLC).

b. Program Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan pada administrasi perkantoran dengan output pelaksanaan Waktu pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan dan telah terlaksana 100% (12 bulan).

Dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2014 tersebut di atas, tidak terdapat sasaran/program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara umum, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1.

2.1.2 Perkiraan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

Adapun perkiraan capaian sasaran/program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

I. Sasaran 1: Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang baik yang ditandai dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik dengan Program utama, yakni Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui kegiatan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat dengan target 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan). Adapun jumlah keluhan yang diterima melalui Media Center sampai dengan bulan juni 2015 (triwulan II) yakni sebanyak 1.272 Keluhan dan telah berhasil ditindaklanjuti sesuai yang ditargetkan (100%).

Dalam pencapaian target indikator Kinerja ini, tidak terdapat hambatan. Keberhasilan capaian tindak lanjut pelayanan keluhan masyarakat tidak lepas dari dukungan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat (TPKPM) Kota Surabaya yang terbentuk melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/54/436.1.2/2013



tentang Tim Pelayanan Keluhan / Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya. Untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan para anggota TPKPM dalam menangani keluhan, Dinas Komunikasi dan Informatika secara rutin mengadakan pertemuan bersama TPKPM.

II. Sasaran II: Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang baik yang ditandai dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik dengan Program utama, yakni Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah :

1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilaksanakan sebanyak 20 kali dan diprediksi terlaksana sebanyak 100% (20 kali) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah terlaksana 7 (tujuh) kali, sehingga prosentasi pencapaian Rencana Kerja 2015, tercapai 53,85%.

2. Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan indikator output Jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang dilakukan sebanyak 78 kali dan diprediksi terlaksana 100% (78 kali) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah terlaksana 32 kali, sehingga prosentasi pencapaian Rencana Kerja 2015 dan realisasi 2015, tercapai 41,03%.

3. Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan indikator output Jumlah data dan informasi yang di-upload di website www.surabaya.go.id sebanyak 1.872 Materi dan diprediksi terlaksana 100% (1.872 materi) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah terlaksana 904 materi, sehingga prosentasi pencapaian Rencana Kerja 2015 dan realisasi 2015, tercapai 48,29%.

III. Sasaran III: Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi dengan program utama, yakni Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi :

1. Kegiatan Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi



- Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan pembangunan CCTV sebanyak 184 titik dan diprediksi terlaksana 100% (184 titik). Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan pemasangan CCTV pada 19 titik, sehingga prosentasi pencapaian Rencana Kerja 2015, tercapai 10,33%.
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Waktu Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.
 3. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data sebanyak 10 sistem dan diprediksi terlaksana 100% (10 sistem) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini belum menghasilkan output kegiatan, karena sedang dalam tahap pengerjaan.
 4. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Waktu pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan pelayanan publik selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian realisasi Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.
 5. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian realisasi Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.
 6. Kegiatan Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Jumlah pembangunan grounding gedung Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12 gedung dan diprediksi terlaksana 100% (12 gedung) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini belum terlaksana



dikarenakan sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan grounding dan dijadwalkan selesai pada bulan Juli 2015.

7. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian realisasi Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.

8. Kegiatan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Waktu pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama yang dilakukan selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian realisasi Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.

9. Kegiatan Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan opensource software selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian realisasi Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.

10. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan output kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 12 kali dan diprediksi terlaksana 100% (12 kali) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian realisasi Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.

IV. Sasaran IV: Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan program utama, yakni Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan dengan indikator output Jumlah lokasi pendidikan yang memanfaatkan layanan Internet 552 lokasi selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015.

Selain empat sasaran diatas, juga terdapat dua Program penunjang lain yakni:



I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan output kegiatan Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian realisasi Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan output kegiatan Waktu Pengadaan dan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% (12 bulan) sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, sehingga prosentasi pencapaian realisasi Rencana Kerja 2015, tercapai 50%.

2.1.3 Evaluasi Pencapaian Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, maka implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tampak pada Tabel 2 (Lampiran), dimana terdapat kegiatan yang pada tahun 2014 telah mencapai target, bahkan melebihi target, yakni pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi (123,08%). Selain itu, juga terdapat kegiatan yang telah mencapai target pada tahun 2014, yakni kegiatan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi (100%). Sedangkan kegiatan yang lain akan mencapai target 100% sesuai Renstra pada tahun 2015.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1 Kondisi Pelayanan SKPD

Sampai dengan Tahun 2015 untuk mendukung komunikasi di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemeliharaan terhadap tower sebanyak 91 Unit dengan rincian ketinggian 6 meter sebanyak 1 unit, 12 meter sebanyak 20 unit, 16 meter sebanyak 8 unit, 20 meter sebanyak 28 unit, 24 meter



sebanyak 5 unit, 30 meter sebanyak 15 unit, 40 meter sebanyak 13 unit, 105 meter sebanyak 1 unit.

Tabel 1

Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2012 – Triwulan II 2015

Uraian	2012	2013	2014	Triwulan II 2015
Menara (tower) (unit)	97	73	91	91

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016, Bappeko

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya Memiliki Situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat 26 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 2

Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2012 – Triwulan II 2015

Uraian	2012	2013	2014	Triwulan II 2015
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada

Salah satu implementasi dari keterbukaan informasi publik, pemerintah Kota Surabaya menjalin komunikasi dengan warga melalui website resmi milik Pemerintah Kota Surabaya yaitu www.surabaya.go.id. Dalam website tersebut warga Surabaya dapat melakukan berbagai macam aktifitas seperti memperoleh informasi tentang pembangunan dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, menyalurkan aspirasi berupa pengaduan dan mengajukan usulan pembangunan untuk tahun berikutnya. Jumlah Kunjungan rata-rata per bulan ke website pada tahun 2013 sebanyak 364.618 kunjungan dan menurun menjadi 244.652 kunjungan pada tahun 2014 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3

**Rata-rata Kunjungan per Bulan pada situs Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2013-2014**

Uraian	2011	2012	2013	2014
Rata-rata kunjungan per Bulan	30.989	134.952	364.618	244.652

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016, Bappeko

Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Surabaya membangun aplikasi layanan publik berbasis TIK yang tersebar di SKPD Pemerintah Kota Surabaya. Jumlah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang dibangun pada tahun 2013 mencapai 19 aplikasi, pada tahun 2014 meningkat menjadi 24 aplikasi



layanan publik dari total 108 pelayanan publik yang ada. Perkembangan jumlah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang dibangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Layanan Publik berbasis TIK Kota Surabaya tahun 2013-2014

no	Uraian	2013	2014
1	Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK	19	24
2	Jumlah pelayanan publik	108	108
3	Presentase layanan Publik berbasis TIK	17,59	22,22

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016, Bappeko

Layanan Publik berbasis TIK diatas dikembangkan ke arah berbasis web dengan maksud mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik berbasis TIK yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2013 jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Surabaya sebanyak 8.651 orang atau sebesar 26,80% dari 32.282 pengguna aplikasi pelayanan publik berbasis TIK. Pada tahun 2014 prosentase pengguna layanan publik berbasis web menjadi 13,83% seperti yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

**Presentase pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui web di Kota Surabaya
Tahun 2013-2014**

no	Uraian	2013	2014
1	Jumlah Pengguna Layanan Publik berbasis TIK	32.282	27.732
2	Jumlah Pengguna layanan Publik berbasis TIK melalui Web	8.651	3.834
3	Presentase pengguna layanan public berbasis TIK melalui Web	26,80%	13,83%

2.2.2 Organisasi dan Tata Laksana Dinas Komunikasi dan Informatika

Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 20 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

2. Tugas Pokok



Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

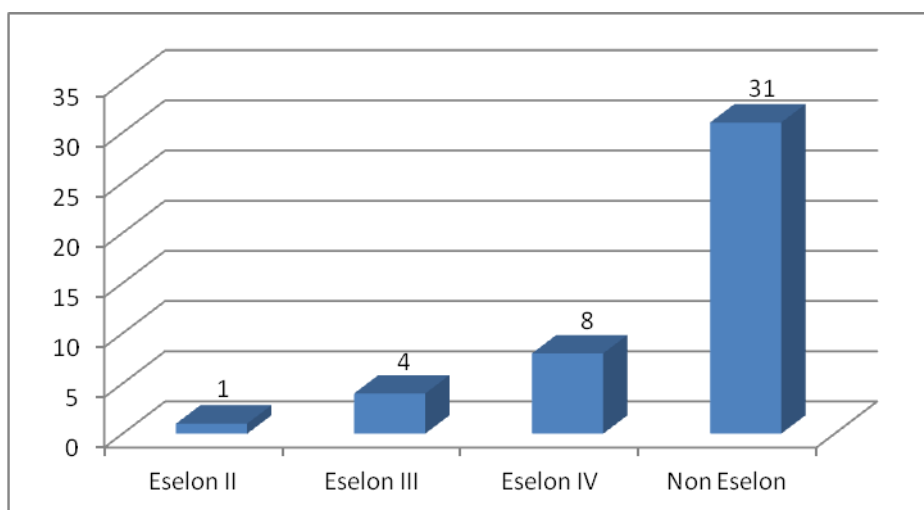
- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinkominfo;
- d) Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Aspek Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jimerto No. 25 – 27 lantai V Kantor Pemerintah Kota Surabaya, telephone Telp. (031) 5475600; 5450082; 5460900; 5463770; 5463435; (031) 5312144 Pesawat 384; 275; 164; 292; 175 dan Fax. (031) 5450154.

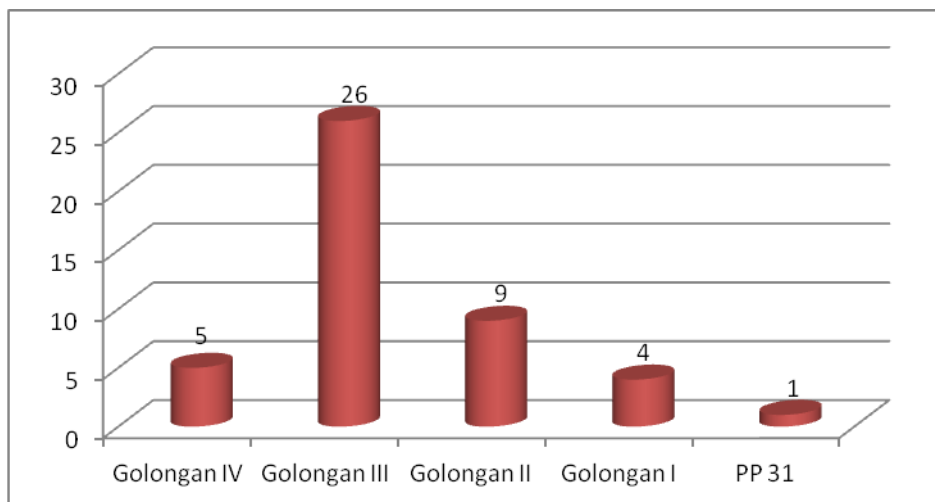
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2015 didukung oleh 45 (Empat Puluh Lima) orang pegawai/karyawan yang terdiri 44 (Empat Puluh Empat) orang PNS dan 1 (satu) orang karyawan dengan status PP 31. Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berdasarkan Eselonisasi, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagaimana grafik berikut :

Gambar 1. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon Tahun 2015

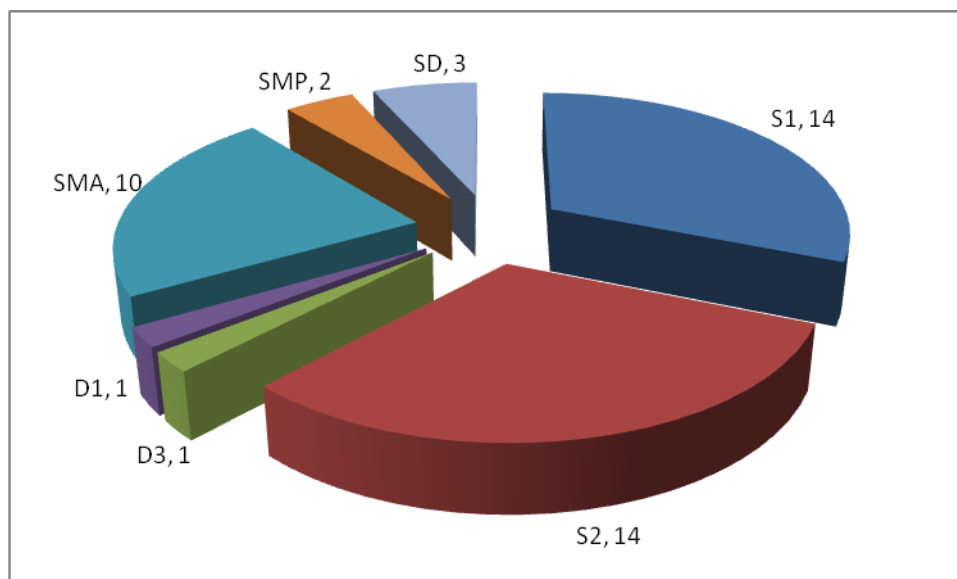




Gambar 2. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2015



Gambar 3. Jumlah Pegawai Dinkominfo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015



5. Struktur Organisasi

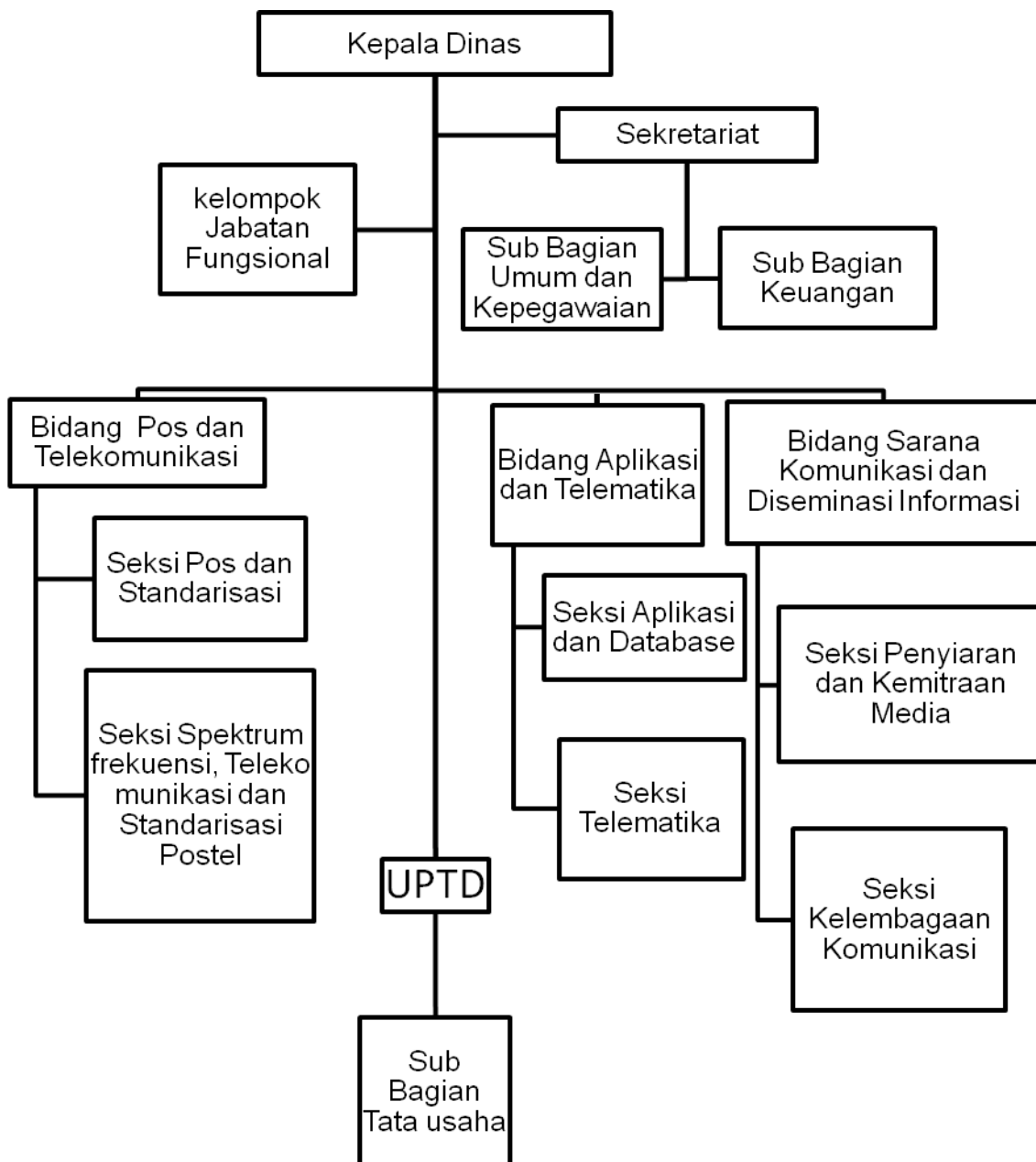
Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 20 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Pos dan Telekomunikasi, yang terdiri atas : Seksi Pos dan Standarisasi serta Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel;



3. Bidang Aplikasi dan Telematika, yang terdiri atas : Seksi Aplikasi dan Data Base serta Seksi Telematika;
4. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, yang terdiri atas : Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media serta Seksi Kelembagaan Komunikasi.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 4 berikut ini:





2.2.3 Tugas dan Pelayanan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Fungsi Dinkominfo :

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang kesekretariatan.

Tugas Sekretariat

- a. Pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- i. Pemrosesan administrasi pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- j. Pemrosesan administrasi pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- k. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota;
- l. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- m. Pemrosesan administrasi pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- n. Pemrosesan administrasi pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;



- o. Mengkoordinasikan pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi dan pemanfaatannya sebagai sarana prasarana telekomunikasi;
- p. Pemrosesan administrasi pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota;
- q. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- r. Pemrosesan administrasi pemberian izin instalansi genset;
- s. Penyusunan peraturan daerah kota di bidang ketenagalistrikan;
- t. Pemrosesan administrasi pemberian izin instalasi penyalur petir.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya. **Sub Bagian Keuangan** mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pos dan Telekomunikasi :

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi.

Tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi :

- a. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;



- b. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- c. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi dan penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- d. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
- e. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan koordinasi
- g. Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;

Seksi Pos dan Standarisasi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pos dan standarisasi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pos dan standarisasi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pos dan standarisasi;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pos dan standarisasi;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi dan Telematika :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang aplikasi dan telematika.



Tugas Bidang Aplikasi dan telematika :

- a. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota;
- d. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota;
- e. Penyediaan jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
- f. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota;
- g. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota;
- h. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota;
- i. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota;
- j. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam kota;
- k. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kota;
- l. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota;
- n. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota.

Seksi Aplikasi dan Data Base mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi dan data base;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi dan data base;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang aplikasi dan data base;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang aplikasi dan data base;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Seksi Telematika mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang telematika;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang telematika;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang telematika;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang telematika;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi :

Adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi :

- a. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota;
- c. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan komunikasi;



- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan komunikasi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan komunikasi;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan komunikasi;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.4 Pedoman dan Standar Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dan standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai berikut:

- 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell
- 6. Standar Operasional Prosedur tentang Penanganan Keluhan Masyarakat
- 7. Standar Operasional Prosedur tentang Permohonan Aplikasi Baru
- 8. Standar Operasional Prosedur tentang Pembuatan Aplikasi baru
- 9. Standar Operasional Prosedur tentang Pengembangan Aplikasi
- 10. Standar Operasional Prosedur tentang Permintaan Jaringan Baru
- 11. Standar Operasional Prosedur tentang Perijinan Jasa Penitipan
- 12. Standar Operasional Prosedur tentang Perijinan Jasa Telekomunikasi
- 13. Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Rekomendasi Cell Plan
- 14. Standar Operasional Prosedur tentang Penerbitan Ijin Operasional Menara
- 15. Standar Operasional Prosedur tentang Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara
- 16. Standar Operasional Prosedur tentang Pendaftaran Peserta Broadband Learning Center (BLC)



17. Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
18. Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi PPID
19. Standar Operasional Prosedur tentang Update/Tambah Menu/Konten Website Pemerintah Kota Surabaya
20. Standar Operasional Prosedur tentang Penanganan Keluhan/Pengaduan dan Permohonan Informasi
21. Standar Operasional Prosedur tentang Broadcast Informasi melalui SMS Gateway
22. Standar Operasional Prosedur tentang Broadcast Undangan melalui SMS Gateway

2.2.5 Keterkaitan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan RPJMD Diskominfo Provinsi Jawa Timur

Untuk mencapai era keterbukaan informasi yang menyeluruh, diperlukan adanya kesesuaian antara program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah daerah. Dengan demikian agar mencapai tujuan nasional di era keterbukaan teknologi dan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berupaya mendukung program atau kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rancangan kegiatan sbb:



Tabel 6

Keterkaitan RPJMD Diskominfo Provinsi Jawa Timur dengan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya		
Sasaran Strategis			Sasaran Strategis		
Uraian	Indikator kinerja Utama	Program/Kegiatan	Sasaran/Program	Indikator kinerja Utama	Kegiatan
Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Persentase tindaklanjut layanan informasi	Program Peningkatan Diseminasi Informasi	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Secara Efisien dan Efektif	Tingkat Pemanfaatan publik Surabaya terhadap berbagai saluran komunikasi informasi dan media massa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
	Persentase tindaklanjut sengketa informasi	Program Komisi Informasi Provinsi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah kunjungan rata-rata per bulan pada website www.surabaya.go.id	Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
				Jumlah partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi	Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pemberdayaan aparatur dan masyarakat yang paham TIK	Program Pemberdayaan Teknologi Komunikasi dan Informatika dan Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi			Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah



Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya		
Sasaran Strategis			Sasaran Strategis		
Uraian	Indikator kinerja Utama	Program/Kegiatan	Sasaran/Program	Indikator kinerja Utama	Kegiatan
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terwujudnya pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat	Persentase pengguna pelayanan publik berbasis TIK melalui internet dan intranet	Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi
		Program Pengembangan Teknologi Informatika	Program peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	persentase layanan publik yang dapat diakses melalui internet	Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi



Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

					Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK
Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Persentase izin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Program Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat Meningkatkan dan Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Persentase Keberhasilan Pembangunan sarana utilitas pendukung keamanan Peningkatan prosentase peningkatan PAD yang bersumber pada perizinan mendirikan bangunan	Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi

Sumber: Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan

Rancangan Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Surabaya 2015-2020



2.2.6 Capaian Pendapatan Asli Daerah

2.2.6.1 Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan KUA PPAS Perubahan TA 2014, target pendapatan asli daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melalui retribusi daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan sebesar Rp. 4.726.988.780,00. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka realisasi yang telah dicapai sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 5.547.110.596,00 (117,35%).

Beberapa peraturan lain yang mendukung capaian realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

2.2.6.2 Perkiraan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

Berdasarkan KUA PPAS TA 2015, target pendapatan asli daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melalui retribusi daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan diprediksi tercapai 100% (Rp. 5.000.000.000,00) sampai dengan Desember 2015. Realisasi yang telah dicapai sampai dengan 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 0,00 (0%).

Belum terealisasinya target dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:



1. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 46/PUU-XII/2014 tentang Pembatalan Penjelasan pasal 124 UU no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Besaran Tariff Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 2 % dari NJOP ($2\% \times \text{NJOP}$)
2. Adanya Surat dari Kementrian Keuangan RI no. S-349/PK/2015 Tanggal 9 Juni 2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap kedua kendala tersebut akan dilakukan tindakan sebagai berikut:

1. Dilakukan pengajuan usulan Revisi Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Dilakukan pengajuan usulan Peraturan Walikota Kota Surabaya tentang Tata cara Penghitungan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2.2.7 Analisis Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.2.7.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika memiliki 2 jenis pelayanan dasar, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui:

- 1) Media massa seperti majalah, radio, dan televisi (12 kali per tahun);



Kegiatan untuk mendukung indikator SPM ini adalah penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Massa melalui radio dengan target tahun 2014 sebanyak 30 kali, dan melalui media Televisi dengan target tahun 2014 sebanyak 18 kali. Realisasi target tahun 2014 melalui Radio terlaksana 36 kali (120%) dan melalui Televisi terlaksana 18 kali (100%).

2) Media baru seperti website (media online) (setiap hari);

Kegiatan untuk mendukung indikator SPM ini adalah Pengelolaan dan pengumpulan data dan informasi Pembangunan Daerah dengan target tahun 2014 sebanyak 1.872 materi. Realisasi target tahun 2014 terlaksana 1.923 materi (103%)

3) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat (12 kali per tahun);

Terdapat 2 (dua) Kegiatan untuk mendukung indikator SPM ini yakni 1). Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi, dengan target pada tahun 2014 sebanyak 12 kali penyelenggaraan fasilitasi komunitas kesenian rakyat. Realisasi tahun 2014 terlaksana sebanyak 12 kali (100%). 2). Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui siaran keliling yang ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 31 kali, terealisasi sebanyak 31 kali (100%).

4) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah diskusi, dan lokakarya (12 kali per tahun);

Terdapat 2 (dua) kegiatan untuk mendukung indikator SPM ini, yakni 1). Fasilitasi dan pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi dengan target pada tahun 2014 sebanyak 7 kali, dan direalisasikan sebanyak 7 kali (100%). 2). Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan target tahun 2014 sebanyak 5 kali, dan direalisasikan sebanyak 5 kali (100%)

5) Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (12 kali per tahun).

Kegiatan untuk mendukung indikator SPM ini melalui publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah dengan target pada tahun 2014



sebanyak 6.476 buah dan telah direalisasikan sebanyak 10.727 buah (165,64%)

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (50%). Target dari indikator SPM ini adalah fasilitasi pemberdayaan kelembagaan komunikasi sebesar 50%, pada tahun 2014 telah terealisasi 95%.

Batas waktu pencapaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut adalah tahun 2015.

2.2.7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Komunikasi dan informatika sebagai media yang digunakan untuk memudahkan setiap orang berkomunikasi, menambah pengetahuan serta sebagai sarana hiburan, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan setiap orang berkomunikasi adalah tersedianya jaringan telepon, jumlah wartel, jumlah surat kabar, stasiun radio/TV, dan pos

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, komunikasi dan informatika termasuk dalam aspek pelayanan umum sebagai pelayanan penunjang dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:



a. Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner.

b. Rasio wartel / warnet terhadap penduduk

Rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk.

c. Jumlah surat kabar nasional / lokal

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional/lokal yang masuk ke daerah.

d. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun lokal yang masuk ke daerah

Pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut diatas, hanya 1 (satu) IKK yang digunakan sebagai pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu rasio wartel / warnet terhadap penduduk mengingat 3 (tiga) indikator lainnya tidak berada dibawah kewenangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun capain indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk pada tahun 2014 adalah 35,32% meningkat sebesar 16,31% dari tahun 2013 yang capaian indikatornya hanya 19,01%.



Tabel 6
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja SKPD
Pemerintah Kota Surabaya

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	2	4	5	6	7	2	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	Kota Surabaya	12	342.634.930	APBD Kota Surabaya						
2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kota Surabaya	13	383.204.866	APBD Kota Surabaya						
3	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Kota Surabaya	78	1.914.229.913	APBD Kota Surabaya						
4	Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kota Surabaya	1872	696.876.989	APBD Kota Surabaya						
5	Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kota Surabaya	27	5.830.991.780	APBD Kota Surabaya						
6	Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kota Surabaya	12	19.824.342.678	APBD Kota Surabaya						
7	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data	Kota Surabaya	5	918.851.520	APBD Kota Surabaya						
8	Pemeliharaan dan	Kota	12	972.350.555	APBD						



Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Surabaya			Kota Surabaya						
9	Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kota Surabaya	12	190.530.323	APBD Kota Surabaya						
10	Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Kota Surabaya	12	345.351.153	APBD Kota Surabaya						
11	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Kota Surabaya	12	1.931.858.474	APBD Kota Surabaya						
12	Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	Kota Surabaya	12	388.733.807	APBD Kota Surabaya						
13	Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software	Kota Surabaya	12	434.451.098	APBD Kota Surabaya						
14	Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Kota Surabaya	12	2.886.860.287	APBD Kota Surabaya						
15	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Kota Surabaya	12	1.606.143.239	APBD Kota Surabaya						
16	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kota Surabaya	12	1.453.151.469	APBD Kota Surabaya						



Tabel 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Surabaya

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Kegiatan	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Indikator	Nilai			2014	2015	2016	2017	2014	Tahun 2015 (realisasi s/d Juni Th 2015)	2016	2017
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui:											
		a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali per tahun	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	radio	30 kali	30 kali	40 kali		36 kali	33 kali	40 kali	
					TV	18 kali	18 kali	25 kali		18 kali	10 kali	25 kali	
				Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Biaya Liputan TV, Pengambilan Gambar dan Pemberitaan	-	-	-	-	-	-	-	



Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Kegiatan	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Indikator	Nilai			2014	2015	2016	2017	2014	Tahun 2015 (realisasi s/d Juni Th 2015)	2016	2017
		b) media baru seperti website (media online);	Setiap hari	Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Pengelolaan Media Center (www.surabaya.go.id)	1.872 materi	1.872 materi	1.872 materi		1.923 materi	724 materi	1.872 materi	
		c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali per tahun	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi	Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat	12 kali	12 kali	12 kali		12 kali	-	12 kali	
				Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Pameran Keliling	12 kali	12 kali	12 kali		-	6 kali	12 kali	
					Siaran Keliling	31 kali	31 kali	31 kali		31 kali	-	31 kali	



Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Kegiatan	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Indikator	Nilai			2014	2015	2016	2017	2014	Tahun 2015 (realisasi s/d Juni Th 2015)	2016	2017
		d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah diskusi, dan lokakarya;	12 kali per tahun	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi	Koorinko (Koordinasi Informasi dan Komunikasi)	7 kali	7 kali	-		7 Kali	-	7 kali	
				Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan Pembangunan	15 kali	15 kali	-		15 kali	-	15 kali	
		e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 kali per tahun	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Publikasi informasi melalui stiker, brosur, poster, spanduk, baliho dan banner	6.476 (buah/lembar/unit)	11.807 (buah/lembar/unit)	12 kali per tahun		10.727 (buah/lembar/unit)	18 kali	12 kali per tahun	



Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Kegiatan	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Indikator	Nilai			2014	2015	2016	2017	2014	Tahun 2015 (realisasi s/d Juni Th 2015)	2016	2017
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi	Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	50%	50%	50%		95%	100%	50%	



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian target Renstra SKPD Tahun 2011-2015, masih ditemukan hambatan dalam mewujudkan target yang direncanakan, serta juga terdapat isu-isu strategis, dan permasalahan urusan komunikasi dan informatika Tahun 2016.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
Program peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Masih ada pelayanan publik yang belum didukung dengan TIK sehingga tidak dapat diakses melalui internet2. Belum meratanya akses masyarakat terhadap internet dan informasi3. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik belum dapat dipenuhi karena belum optimalnya pemanfaatan TIK4. Kesadaran dan tingkat pemahaman SKPD maupun stake holder terhadap manfaat dan pentingnya pengelolaan TIK masih rendah	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan2. Konsistensi ketersediaan anggaran3. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan4. Konsistensi penegakan regulasi/peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pembangunan5. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pembangunan6. Tersedianya infrastruktur yang dapat mendukung kelancaran kegiatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat



	5. Rendahnya kualitas SDM pada SKPD di bidang Teknis IT	
1. Program pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa	1. Sistem informasi pelayanan publik yang belum terintegrasi secara optimal 2. Kurangnya dukungan SKPD terhadap IT untuk mengupdate data yang berkenaan dengan teknologi dan informasi	1. Dukungan dari Pimpinan Daerah untuk pengembangan IT pada sektor SDM, sarana dan prasarana pendukung 2. Kecepatan dan ketepatan SDM dalam mentransfer IT ke SKPD masing-masing dan kepada masyarakat luas yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan IT yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Belum seimbang tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dibandingkan kapasitas sumber daya aparatur yang tersedia	1. Adanya Kepercayaan Masyarakat terhadap kominfo untuk menyampaikan keluhan pada SKPD terkait 2. Perekrutan aparatur yang memiliki kemampuan di bidang IT

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
Aspek Daya saing	Fasilitas wilayah/ infrastruktur	Komunikasi dan Informatika	1. Masih ada pelayanan publik yang belum didukung dengan TIK sehingga tidak dapat diakses melalui internet



			<ol style="list-style-type: none">2. Belum meratanya akses masyarakat terhadap internet dan informasi3. Sistem informasi pelayanan publik yang belum terintegrasi secara optimal4. Infrastruktur jaringan TIK sebagai pendukung utama E-Government belum terintegrasi secara utuh;5. Kurangnya pengetahuan komunikasi dalam <i>transfer knowledge</i> dari pegawai, sehingga tidak bisa berperan sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik secara maksimal;
--	--	--	---



2.3.4. Perumusan Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah Kota Surabaya

Permasalahan pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran Pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
1. Masih ada pelayanan publik yang belum didukung dengan TIK sehingga tidak dapat diakses melalui internet	1.Kebijakan Pemerintah yang mendukung pelayanan Publik di bidang IT	1. Belum adanya standarisasi dalam pengelolaan TIK	1.Peningkatan sistem dan prosedur pelayanan publik	1. Memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembangunan berbasis TIK
2. Belum meratanya akses masyarakat terhadap internet dan informasi	2.Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan public yang berbasis IT	2.Belum optimalnya pelaksanaan aturan mengenai pengelolaan TIK di lingkungan Pemkot Surabaya	2.Meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik terkait pelayanan publik yang mudah dijangkau	2.Terwujudnya pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat
3. Sistem informasi pelayanan publik yang belum terintegrasi secara optimal	3.Perekrutan calon pegawai yang kompeten di Bidang IT	3.Belum terlaksananya secara keseluruhan masterplan TIK		3. Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standar dan kualitas



4. Kesadaran dan tingkat pemahaman SKPD maupun stake holder terhadap manfaat dan pentingnya pengelolaan TIK masih rendah		4.Keterbatasan sumberdaya (PNS) di bidang TIK		4.Terlaksananya pengelolaan sistem informasi dan komunikasi secara efisien dan efektif
5. Rendahnya kualitas SDM pada SKPD di bidang Teknis IT				



Isu-isu strategis :

1. Penyelenggaraan good governance
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam perekonomian masyarakat Surabaya;
3. Penggunaan software original dan atau Open Source;
4. Penataan dan pengembangan telekomunikasi;
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik;
6. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik dan mencerahkan masyarakat.

Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2016 adalah:

1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas dan kualitas informasi, hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat.
2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program pembangunan kota dan layanan publik yang diberikan.
4. Pengembangan operating system legal (Open Source Soerya) untuk kepentingan government dan pendidikan;
5. Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi
6. Penggunaan serta pengembangan Micro Cell Pole sebagai sarana telekomunikasi
7. Meningkatkan dan menambah SDM yang menangani infrastruktur jaringan TIK Pemerintah Kota Surabaya
8. Bimbingan teknis untuk pegawai dalam bidang keilmuan komunikasi dan publisitas
9. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat;

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada pengusulan dari Masyarakat atau *stakeholder*.